



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PADJADJARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RIJA SUDIRJA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG SUMBER DAYA DAN ORGANISASI
3. NHK : 860633

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.650.500.000

1. Tanah Seluas 3464 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 247.500.000
2. Tanah Seluas 954 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 68.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.500.000.000
4. Tanah Seluas 567 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.835.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 792.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV-TURBO PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV E CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 60.750.000

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 204.498.892

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 7.707.748.892



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.707.748.892

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.